

ANALISIS PEMBERITAAN ISU AKTIVITAS PERTAMBANGAN NIKEL DI KABUPATEN RAJA AMPAT MELALUI PERSPEKTIF *AGENDA SETTING THEORY*

M Hanif Kurniawan
Universitas Palangka Raya
hanif120302@gmail.com

Abstract

Climate change, a prominent global agenda in the last decade, has driven the adoption and implementation of green economic policies and sustainable development campaign by various nations. The Indonesian government, through its clean energy transition campaign, has promoted electric vehicle (EV) adoption to reduce carbon emissions. This initiative has spurred a new industrial market in Indonesia, supported by the government's nickel downstreaming policy, given nickel's critical role in the EV industry. However, nickel mining and its industries have demonstrated significant negative impacts on the environment and local communities, notably in Raja Ampat. This qualitative descriptive study, employing literature review and observational approach, found that intensive reporting by the press and activists via mass media and social media platforms regarding nickel mining activities in Raja Ampat effectively created a media agenda. This transformed into public agenda and subsequently a policy agenda within a short timeframe. The public pressure generated by this widespread response compelled the government to act in accordance with popular demand, leading to the temporary cessation of nickel mining activities in Raja Ampat. This research demonstrates implementing agenda-setting method within media activism can be an effective approach in crisis communication to efficiently garner public response and drive policy action.

Keywords: *Nickel Mining, Raja Ampat, Agenda Setting, Crisis Communication, Media Activism*

Abstrak

Perubahan iklim yang menjadi agenda global dalam satu dasawarsa terakhir mendorong adopsi dan implementasi dari kebijakan ekonomi hijau dan perkembangan berkelanjutan oleh berbagai negara. Melalui kampanye transisi energi bersih pemerintah Indonesia mendorong adopsi kendaraan listrik guna mengurangi tingkat emisi karbon. Hal ini membuka pasar industri baru di Indonesia yang diimplementasikan oleh pemerintah melalui kebijakan hilirasi nikel yang merupakan komponen penting dalam industri kendaraan listrik. Dalam praktiknya pertambangan dan industri nikel menunjukkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar di mana salah satunya terdapat di Kabupaten Raja Ampat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan observasi. Penelitian ini menemukan bahwa pemberitaan intensif oleh pers dan aktivis melalui media massa serta media sosial mengenai aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat menciptakan agenda media yang kemudian berubah menjadi agenda publik dan agenda kebijakan dengan sangat efisien dalam kurun waktu yang singkat. Tekanan yang diterima oleh pemerintah melalui respon publik memaksa pemerintah untuk bertindak sesuai dengan permintaan populer (*popular demand*) dengan menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan teori *agenda setting* dalam suatu kegiatan aktivisme media dapat diimplementasikan dalam suatu upaya pengkomunikasian krisis (*crisis communication*) guna mendapatkan respon publik dengan efisien.

Kata Kunci: *Pertambangan Nikel, Raja Ampat, Agenda Setting, Komunikasi Krisis, Aktivisme Media*

PENDAHULUAN

Isu perubahan iklim telah menjadi suatu perbincangan sentral dalam dunia akademik dan politik dalam satu dasawarsa terakhir. Pembahasan mengenai perubahan iklim menawarkan sebuah urgensi baru yang kemudian diterima sebagai suatu agenda global yang berfokus pada persoalan keberlanjutan lingkungan melalui kampanye-kampanye *sustainable development*, *alternative lifestyle*, dan juga

green economy (Abisono, 2024; Loiseau dkk., 2016).

Kebijakan transisi energi bersih yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Tahun 2019 mendorong pengambilan langkah-langkah berkelanjutan melalui pengimplementasian kebijakan-kebijakan perkembangan berkelanjutan di mana salah satunya merupakan adopsi penggunaan kendaraan listrik (*electric vehicle*) dalam rangka untuk

mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil (Zola dkk., 2023). Kebijakan ini beracuan pada target capaian pemerintah yaitu komitmen pengurangan gas rumah kaca sebesar 41% pada Tahun 2030 serta terwujudnya nol emisi gas rumah kaca (*zero greenhouse gas achievement*) pada tahun 2060 sebagaimana yang disetujui dalam Perjanjian Paris pada Tahun 2015 (Raihan dkk., 2022).

Kebijakan adopsi kendaraan listrik menghasilkan potensi industri baru di Indonesia, diantaranya adalah industri pertambangan nikel yang menjadi salah satu komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik. Pemerintah mencanangkan kebijakan hilirasi industri nikel pada tahun dengan menghentikan impor bijih nikel dan melakukan ekspansi terhadap skala pertambangan nikel yang ada di Indonesia. (Hutagalung dkk., 2025).

Indonesia bagian timur menjadi salah satu wilayah utama penghasil bijih nikel di mana pertambangan-pertambangan dan pabrik pengolahan bijih nikel banyak dibangun di daerah Halmahera, Maluku Utara, dan wilayah lainnya (Muhid dkk., 2024). Kebijakan hilirasi tersebut menghasilkan suatu permasalahan baru dengan munculnya dampak-dampak seperti pencemaran lingkungan dan permasalahan sosial yang muncul akibat aktivitas antropogenik pertambangan nikel di wilayah tersebut. Pencemaran laut pesisir, deforestasi masif, hingga sengketa hutan ulayat masyarakat adat menimbulkan suatu permasalahan krusial dalam pengimplementasian kebijakan hilirasi industri nikel (Hady, 2018; Syarifuddin, 2022). Gerakan-gerakan sosial yang muncul sebagai respon dari kegiatan esktraktivisme pertambangan nikel tersebut

mendapatkan atensi dari publik melalui pemberitaan intensif di media massa dan media sosial.

Pemberitaan mengenai dampak lingkungan dan sosial di Halmahera kemudian membentuk persepsi publik mengenai dampak pertambangan nikel terhadap kondisi lingkungan dan sosial. Persepsi publik yang cenderung negatif terhadap aktivitas pertambangan nikel membuat munculnya beragam respon-respon terhadap ekspansi pertambangan nikel lainnya seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Raja Ampat .

Kabupaten Raja Ampat yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya merupakan daerah yang terkenal akan keindahan alamnya dan telah menjadi destinasi wisata yang penting di wilayah Indonesia bagian timur. Eksistensi aktivitas pertambangan nikel yang terdapat di Pulau Gag di Kabupaten Raja Ampat mendorong beragam pendapat publik yang mayoritas mengancam eksistensi aktivitas pertambangan disana. Publik dengan aktif mengecam dan melakukan protes terhadap langkah pemerintah yang dipandang mengenyampingkan pertimbangan lingkungan dan pada akhirnya mementahkan kembali tujuan awal kebijakan ekonomi hijau yang dalam pengimplementasiannya cenderung menghasilkan dampak destruktif bagi lingkungan dan masyarakat. (Hastanti & Triantoro, 2012)

Pemberitaan intensif mengenai pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat oleh pers dan masyarakat melalui media massa dan media sosial mendapatkan atensi publik dan mendorong lahirnya urgensi untuk menghentikan aktivitas pertambangan nikel di wilayah tersebut. Pemberitaan tersebut mendapatkan banyak

tanggapan dari beragam kalangan mulai dari masyarakat umum, akademisi, politikus, hingga mantan Menteri Kelautan dan Maritim, Susi Pudjiastuti yang turut mengecam aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat melalui unggahannya dalam laman akun pribadinya di Twitter.

Atensi publik tinggi dan pemberitaan yang intensif juga mendorong publik untuk berpartisipasi dalam mengecam aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat melalui unggahan-unggahan di media sosial. Hal ini kemudian memberikan tekanan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan di mana pada tanggal 05 Juni 2025, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, Bahlil Lahadalia, memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel oleh PT. Gag Nikel, PT. Kawei Sejahtera Mining, PT. Anugrah Surya Pratama, dan PT. Mulya Raymond Perkasa di wilayah Kabupaten Raja Ampat.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peristiwa pemberitaan aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat melalui perspektif teori komunikasi massa *agenda setting* dengan melihat bagaimana pengkondisian aktivitas nikel dari agendam media menjadi agenda publik menimbulkan atensi dan urgensi dalam masyarakat yang kemudian mendorong isu tersebut menjadi suatu agenda kebijakan yang mana dilakukan dengan memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap isu tersebut. Kajian ini berfokus terhadap aspek-aspek penggunaan media massa dan media sosial yang mendorong transformasi dari suatu agenda media menjadi agenda publik dan bagaimana kemudian agenda publik bertransisi menjadi suatu agenda kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Metode studi kasus dipilih dikarenakan fungsinya untuk mengkaji suatu fenomena atau peristiwa secara menyeluruh dan mendalam. (Assyakurrohim dkk., 2022). Dalam metode studi kasus peneliti berfungsi sebagai instrumen penelitian utama dalam memahami, mendekonstruksi, dan menyimpulkan fenomena atau isu yang menjadi pembahasan melalui tahapan yang sistematis, di mana peneliti mencoba untuk menemukan variable-variabel penting yang melatari munculnya fenomena atau isu tersebut (Hardani dkk., 2020).

Pengumpulan data primer akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) studi literatur dan (2) observasi. Studi literatur atau *literature study* menjadi digunakan untuk mengumpulkan dan mengkaji data secara sistematis dari artikel berita, jurnal ilmiah, dan dokumen kredibel lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penulis juga menggunakan pendekatan metode observasi di mana metode observasi ini diimplementasikan oleh penulis dalam bentuk observasi aktivitas media massa digital dan juga media sosial sejak tanggal 04/06/2025 hingga 09/06/2025. Dalam observasinya, penulis juga menggunakan data-data statistik mengenai *traffic* dan juga frekuensi pemberitaan dan pencarian sebagai data sekunder yang kemudian terlebih dahulu ditriangulasikan dan divalidasi melalui komparasi dengan temuan informasi lain yang didapatkan oleh penulis. data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan

pendekatan statistik deskriptif guna melihat hubungan data yang didapatkan dengan data kualitatif hasil observasi lainnya.

Dalam melaksanakan observasi di dalam penelitian ini, penulis menggunakan media massa digital dan media sosial sebagai sumber data utama. Media massa yang dipilih adalah media massa digital yang terafiliasi dengan perusahaan maupun organisasi yang memiliki kredibilitas tinggi seperti CNN, Kompas, Detik, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk media sosial, penulis memilih untuk menggunakan Instagram dan Twitter sebagai sumber atas pertimbangan kecepatan arus informasi dan kebebasan berbicara serta pertimbangan bahwa kedua platform media sosial tersebut memiliki fitur tagar (*hashtags*) yang dapat memudahkan penulis untuk dapat mencari unggahan-unggahan yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang dibahas. Pertimbangan lainnya adalah bahwa Twitter memiliki jumlah pengguna cukup stabil (Masitah & Dewi, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori *Agenda Setting* dan Media Massa Kontemporer

Teori *agenda setting* adalah sebuah teori komunikasi massa yang dilandaskan pada dua asumsi dasar peran media dalam komunikasi massa dan masyarakat, yaitu:

1. Pers dan media massa tidak selalu mencerminkan kenyataan yang ada pada masyarakat. Mereka memilah dan mengkonstruksi isu.
2. Konsentrasi media massa befokus hanya pada isu-isu tertentu untuk ditayangkan dalam upaya menunjukkan bahwa isu tersebut lebih penting dari isu lainnya. (Ritonga, 2018)

Teori ini pertama kali dicetuskan oleh seorang jurnalis ternama Amerika Serikat bernama Walter Lippman pada 1922 dan dipopulerkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Lewis pada tahun 1972 melalui kajiannya mengenai Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1968 yang menggunakan pendekatan teori *agenda setting*, kajian ini lebih dikenal dengan sebutan "*The Chapel Hill Study*". (Trigueros & Lacasa-Mas, 2018)

McCombs dan Lewis berpendapat bahwa media massa memiliki kapabilitas untuk memobilisasi hal atau aspek menonjol yang dimiliki oleh suatu berita dari sebuah agenda media (*news agenda*) menjadi agenda public (*public agenda*). Hal ini secara tidak langsung menjadikan media memiliki kemampuan untuk membuat apa yang dianggapnya penting menjadi, menjadi penting pula bagi masyarakat (Ritonga, 2018). Uniknya perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam dua dasawarsa terakhir tidak mengurangi reliabilitas dari teori *agenda setting*. teori yang sebelumnya diimplementasikan melalui kajian media disaat di mana koran, radio, dan televisi memiliki tingkat pengaruh yang signifikan pada masyarakat ternyata juga masih dapat diimplementasikan ke dalam masyarakat yang mayoritas telah betransformasi dan mengadopsi gaya hidup digital di mana media sosial dan juga pemberitaan melalui artikel internet dan tayangan video daring memiliki tingkat signifikasi yang tinggi terhadap masyarakat (Astari, 2021; Hadi S dkk., 2021).

Teori *Agenda setting* juga merupakan konsep yang melihat bahwa dalam mengangkat suatu isu terdapat tahapan-tahapan tertentu. agenda media (*media agenda*) menjadi tahapan pertama di mana

di dalamnya media memilah atau memfiltrasi isu yang akan dijadikan sebagai fokus sentral dari pemberitaan dan penanyangan media tersebut (Hadi S dkk., 2021). Tahapan agenda media juga merupakan hak prerogratif media dalam melakukan *framing* dan pengkonsepan terhadap suatu isu untuk ditujukan kepada publik. Tahapan agenda publik (*public agenda*) adalah tahapan di mana masyarakat mulai mengadopsi dan menaruh atensi terhadap isu yang diangkat oleh media dan menjadikannya sebagai hal yang penting dan mendesak. (Ritonga, 2018). Sedangkan tahap yang terakhir adalah agenda kebijakan (*policy agenda*) di mana isu yang diangkat oleh media yang kemudian diadopsi dan mendapat perhatian publik menimbulkan respon publik. Respon tersebut kemudian menimbulkan rasa urgensi (*sense of urgency*) di masyarakat dan menimbulkan tekanan pada pihak-pihak yang masyarakat anggap mampu membuat perubahan atau melakukan tindakan seperti lembaga pemerintahan. Apabila dalam menanggapi isu tersebut

pemerintah mengambil tindakan seperti perubahan regulasi dan pengambilan kebijakan maka tahapan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai agenda kebijakan.

Perkembangan teknologi informasi meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap arus informasi, hal ini berpotensi memperbesar pengaruh dan dampak yang dapat disebabkan oleh media kepada masyarakat. Eksistensi media sosial yang memberikan kemampuan masyarakat untuk dapat memproduksi dan mempublikasikan konten, tulisan, opini, maupun karyanya secara daring membuat munculnya pertanyaan mengenai “siapa yang mempengaruhi siapa?” dikarenakan maraknya konten buatan pengguna atau *user generated content (UGC)* dalam media sosial membuat masyarakat sebagai pengguna juga turut melebur menjadi bagian dari media massa itu sendiri (Astari, 2021)

Maka dengan mempertimbangkan aspek tersebut, penuli membagi media massa kontemporer berbentuk digital ke dalam dua kategori utama:

Tabel 1 Kategorisasi Media Massa Kontemporer

Kategori	Keterangan	Contoh Media
Media Massa Arus Utama	Media arus utama adalah media massa yang dimiliki atau oleh perusahaan swasta, organisasi, ataupun lembaga. Konten yang diproduksi umumnya melalui tahap kurasi atau <i>review</i> terlebih dahulu sebelum ditayangkan.	Kompas, Tempo, Kumparan, CNN, Greenpeace, Detik, dsb.
Media Sosial	Media yang menyajikan <i>user generated content</i> , di mana pengguna memiliki kapabilitas untuk memproduksi dan menayangkan konten, opini, dan juga karyanya sendiri.	Instagram, Twitter (X), Facebook, dsb.

Penulis mendasarkan dikotomi kategorisasi media massa diatas berdasarkan pertimbangan bahwa media

massa arus utama dan media sosial memiliki tingkat kredibilitas (*level of credibility*) yang berbeda di mana informasi

yang terdapat di media sosial yang diproduksi oleh pengguna cenderung tidak didukung oleh izin atau legalitas yang membuat informasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pertimbangan lainnya adalah bahwa informasi yang dibagikan oleh memiliki potensi ketidakbenaran yang tinggi karena tidak adanya proses kurasi atau *peer review* untuk memverifikasi informasi tersebut sebelum menjadi konsumsi publik (Astari, 2021; Azman, 2018).

Penulis menyadari bahwa Kompas, Tempo, Detik, CNN, dan pelbagai entitas media arus utama lainnya juga turut menggunakan platform media sosial (Instagram, Twitter, Facebook, dsb) maka dari itu penulis tetap mengkategorikan konten-konten dan tulisan yang dimuat pada laman media sosial entitas media arus utama tersebut sebagai media arus utama dikarenakan konten-konten tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai *user generated content*.

Media Massa Sebagai *Attention-Harvesting Mechanism* dalam Pengangkatan Isu Pertambangan Nikel Raja Ampat

Nitesh Tripathi (2023) menyatakan bahwa media massa memiliki mekanisme untuk memanen atensi masyarakat (*attention-harvesting mechanism*). Media massa sebagai alat komunikasi (*means of communication*) memiliki kapabilitas untuk mengumpulkan atensi publik dengan memanfaatkan dorongan kebutuhan manusia atas informasi (*human needs of informations*). Manusia pada dasarnya memiliki oleh dorongan untuk

mendapatkan informasi, informasi menjadi krusial dalam kehidupan manusia dikarenakan manusia membutuhkannya dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah dan alokasi sumber daya (Rouse & Rouse, 1984). Hal ini berkaitan dengan teori *agenda setting* yang didalamnya terdapat proses transformasi dari agenda media menjadi agenda publik. Agenda media membutuhkan atensi publik untuk dapat diadopsi menjadi agenda publik, hal ini mendorong media massa untuk menciptakan suatu urgensi terhadap isu yang diangkatnya. Momentum juga berperan aktif dalam menangkap atensi publik.

Dalam konteks penelitian ini, terangkatnya isu aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat tidak dapat dilepaskan dari peristiwa protes yang dilakukan para aktivis Greenpeace Indonesia dalam kegiatan *Indonesia Critical Minerals Conference 2025* pada tanggal 03 Juni Tahun 2025. Pendekatan tidak biasa yang dilakukan oleh aktivis Greenpeace dalam melakukan protes pada konferensi tersebut mendapatkan banyak atensi dari media arus utama besar seperti CNN, Kompas, Tempo dan beragam media arus utama dalam turut meliput dan memberitakan peristiwa tersebut di dalam artikel-artikel berita, baik pada masing-masing laman berita media tersebut maupun melalui laman akun media sosial. Peliputan yang intensif melalui beragam medium informasi berupa artikel, video pendek, dan juga perbincangan radio maupun siniar.

Kritik Industrialisasi Nikel, Aktivis Greenpeace Gelar Aksi di Konferensi Nikel Internasional di Jakarta

Greenpeace Indonesia

3 Juni 2025 • 0 Komentar

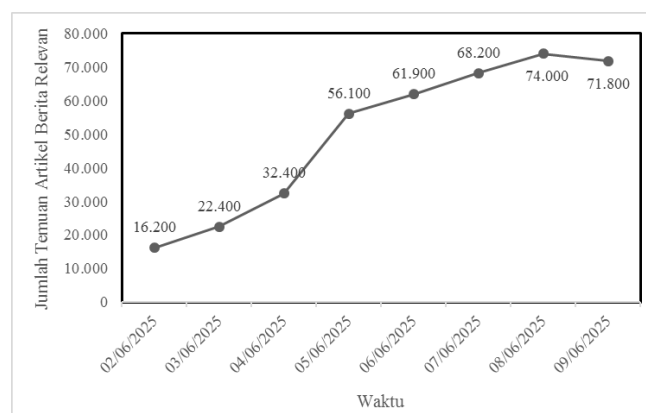


Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan banner bertuliskan "Nickel Mines Destroy Lives" (Tambang Nikel Menghancurkan Kehidupan) saat Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Degraseno memberikan sambutan di acara Indonesia Indonesia Critical Minerals Conference 2025 hari ini di Jakarta.

Gambar 1. Pemberitaan aksi aktivis Greenpeace di *Indonesia Critical Minerals Conference 2025* di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2025. Sumber: greenpeace.org/indonesia.

Pengunggahan peliputan aksi protes tersebut pada laman Greenpeace pada tanggal 03 Juni 2025 kemudian ditangkap dan dijadikan sebagai isu sentral oleh media-media massa arus utama. Hal ini dapat dilihat dari volume perilsan dan

penanyangan artikel berita dengan topik relevan seputar kata kunci “tambang nikel Raja Ampat” dan juga “Save Raja Ampat” yang menunjukkan perkembangan yang drastis.



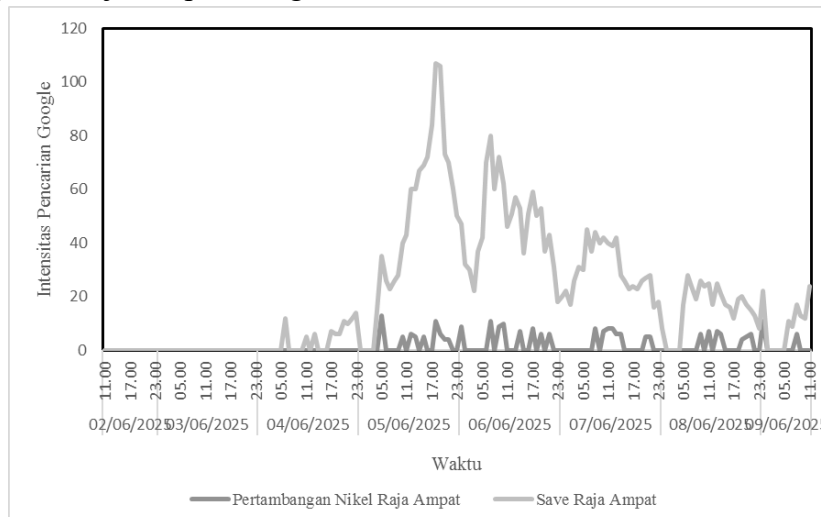
Gambar 2. Grafik jumlah hasil temuan pencarian artikel berita yang memiliki relevansi dengan kata kunci “tambang nikel Raja Ampat” di laman Google News dalam kurun periode waktu satu minggu (02/06/2025-09/06/2025). Sumber: news.google.com (data diambil pada tanggal 10/06/2026, Pukul 14:40 WIB).

Dari grafik pada gambar 1.2 diatas dapat dilihat terdapat peningkatan yang cukup drastis mengenai intensitas pemberitaan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat. Dilihat bagaimana pemberitaan dengan topik yang relevan pada tanggal 02 Juni 2025 berada pada angka estimasi 16.200 artikel pemberitaan, sedangkan pada tanggal 03 Juni 2025 terdapat 22.400 artikel pemberitaan mengenai pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat. Hal ini dapat dijadikan indikator untuk melihat tendensi media massa arus utama untuk menjadikan isu pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat sebagai isu

utama. Peningkatan intensitas pemberitaan oleh media arus utama bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan *engagement* atau jangkauan atensi publik terhadap isu tersebut.

Public Participation Sebagai Indikator Adopsi Agenda Media Sebagai Agenda Publik

Pemberitaan intensif oleh media arus utama mendapatkan atensi publik yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat melalui respons yang ditunjukkan oleh publik melalui aktivitas-aktivitas di internet dan ruang media sosial.



Gambar 3. Data intensitas pencarian google.co.id memperlihatkan aktivitas pencarian dengan kata kunci “Tambang nikel raja ampat” dan “Save Raja Ampat” dalam kurun waktu satu minggu (02/06/2025-09/06/2025). Sumber: <https://trends.google.co.id> (data diambil pada tanggal 09/06/2026, Pukul 12:30 WIB).

Dapat dilihat bahwa aktivitas pencarian menggunakan kata kunci pencarian “Tambang Nikel Raja Ampat” dan “Save Raja Ampat” mulai dapat diamati aktivitasnya pada tanggal 04/06/2025. Dengan demikian informasi tersebut dapat digunakan dalam rangka menentukan kapankah pertama kali isu tersebut mendapatkan atensi pengguna media massa digital dan media sosial.

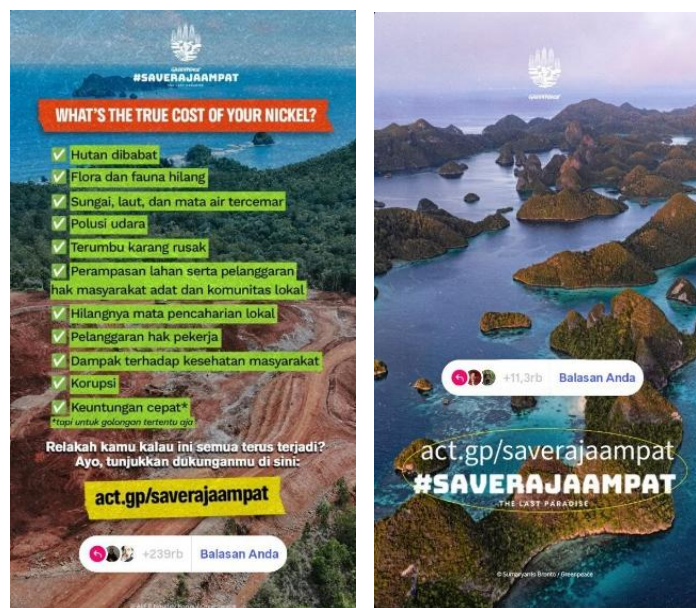
Dapat dilihat pula bahwa terdapat lonjakan yang cukup drastis di tanggal 04/06/2025 pada pukul 02.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB dapat dijadikan indikator bahwa pada saat tersebut atensi masyarakat berada pada titik puncaknya.

Lonjakan pencarian (kueri) sebagaimana yang dapat dilihat di gambar 1.3 mengenai kata kunci “Tambang Nikel Raja Ampat” dan “Save Raja Ampat” juga

dapat dianggap sebagai respon publik mengenai informasi pemberitaan tersebut. Para pengguna internet mungkin mendapatkan dorongan untuk mencari informasi tambahan atau lanjutan mengenai pemberitaan aktivitas pertambangan di Raja Ampat.

Di hari yang sama (03/06/2025) Greenpeace juga memulai kampanye #SaveRajaAmpat-nya melalui platform

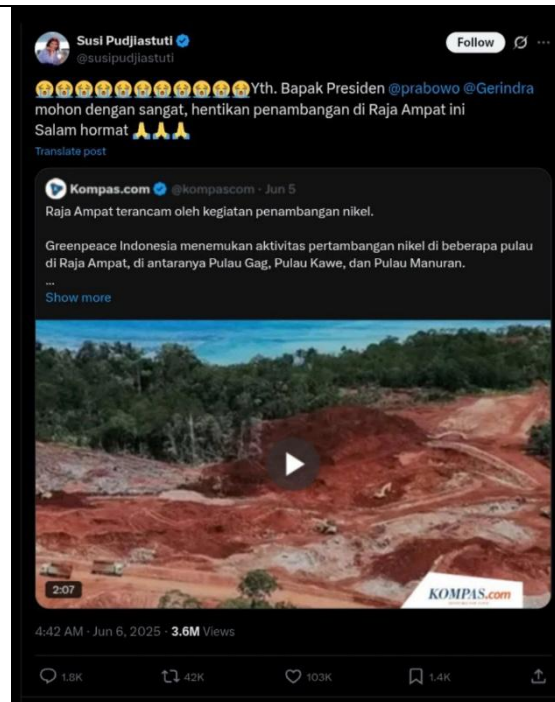
Instagram dengan memanfaatkan salah satu fitur platform tersebut yaitu membuat unggahan cerita Instagram yang dapat dibagikan secara berantai. Tindakan ini kemudian menambah skala atensi publik terhadap isu yang diangkat karena kini publik kini berpartisipasi aktif dalam mendistribusikan informasi dan kampanye #SaveRajaAmpat melalui media sosial.



Gambar 4. Kampanye digital melalui Instagram yang dilakukan oleh Greenpeace melalui metode unggahan cerita pengguna. Sumber: *instagram.com/greenpeace.id*

Dengan demikian kini isu yang sebelumnya merupakan sebuah agenda media telah diadopsi oleh masyarakat sebagai agenda publik karena telah mendapatkan atensi penuh dari publik (Hadi S dkk., 2021). Atensi masyarakat sempat turun secara drastis pada tanggal 05 Juni 2025 lalu kembali meningkat secara drastis pada tanggal 06 Juni 2025 yang

disebabkan oleh unggahan tanggapannya terhadap pemberitaan oleh Kompas di platform Twitter (X) oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti yang turut menyuarakan keprihatinannya terhadap isu aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat.



Gambar 1.5. Unggahan mantan Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pada akun Twitter-nya pada tanggal 06/06/2025. Sumber: x.com/susipudjiastuti.

Unggahan Susi Pudjiastuti secara efektif kembali menarik atensi publik secara masif dengan 3,6 juta kali diakses. Hal ini dapat diakibatkan oleh terkejutnya publik bahwa pernyataan pendukung isu tersebut datang dari individu yang dianggap tidak akan berseberangan dengan kebijakan pemerintah yang disaat yang sama sedang berusaha menjustifikasi aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat tersebut. Dampak dari unggahan Susi Pudjiastuti dapat kita lihat apabila kita mengamati waktu unggahan tersebut yaitu pada pukul 04.42 WIB di tanggal 06 Juni 2025. Informasi ini apabila kita komparasikan dengan grafik atensi publik yang terdapat pada Gambar 1.3, dapat kita lihat bahwa peningkatan drastis pada tanggal 06 Juni 2025 tepat sebelum pukul 05.00 WIB yang merupakan waktu di mana masyarakat mulai mengakses dan mendapatkan informasi melalui unggahan Susi Pudjiastuti beserta media-media arus

utama yang turut memberitakan responnya melalui artikel-artikel berita di internet.

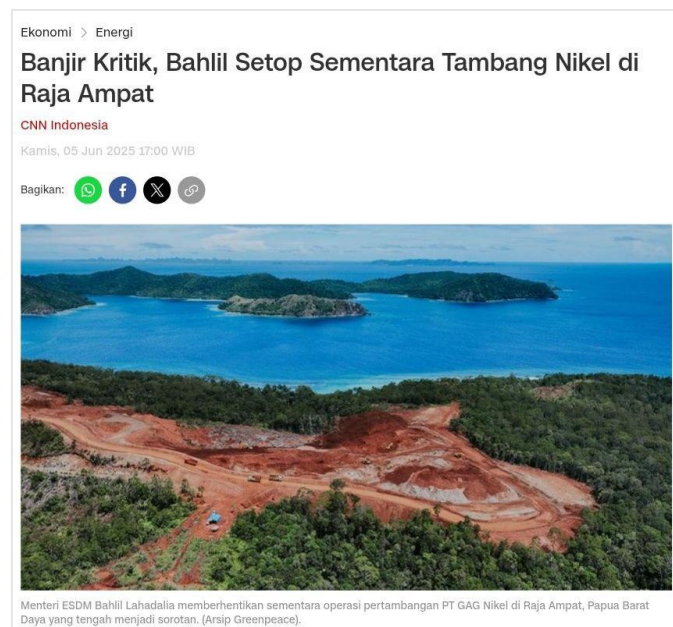
Hal ini menyiratkan bahwa tindakan dan atensi masyarakat telah berorientasi pada *media-driven action* terutama apabila dalam proses agenda publik terdapat figur-figur besar dalam masyarakat sebagai intermediari dalam menafsirkan, menyuarakan dan mengangkat isu tersebut (Astari, 2021).

Berdasarkan pendapat Harcup dan O'Neill (2017), peran Susi Pudjiastuti memenuhi posisi *the power elite* atau individu elit berpengaruh yang memiliki *prestige* dan posisi terpandang pada publik. Respon politisi atau individu-individu berpengaruh tersebut menjadi katalis isu kepada khalayak publik, di mana posisi intermediari juga berperan sebagai *key opinion leader* yang perspektifnya terhadap suatu isu akan banyak diadopsi oleh publik (Astari, 2021; Harcup & O'Neill, 2017).

Public Agenda, Popular Demand, dan Agenda Kebijakan (Policy Agenda)

Dorongan dan tekanan yang diakibatkan dari salah satu aspek agenda publik yaitu peningkatan atensi publik menimbulkan munculnya suatu tuntutan populer (*popular demand*) di masyarakat. Dalam teori *agenda setting*, *popular demand* memainkan peran penting karena *popular demand* itu sendiri merupakan tujuan dari agenda publik dan bentuk manifestasi dari upaya *agenda setting* yang dilakukan oleh media massa (Zahariadis, 2016).

Publik menuntut untuk menghentikan aktivitas dan menutup pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat. Salah satu figur *stakeholders* yang terdampak adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang terus mendapatkan tekanan dari masyarakat. Pengadopsian tuntutan masyarakat oleh pemerintah yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan (ataupun perubahan kebijakan) merupakan salah satu indikator bahwa agenda publik telah bertransformasi menjadi agenda kebijakan (*policy agenda*).



Gambar 6. Artikel pemberitaan tindakan yang diambil oleh pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia oleh CNN Indonesia pada tanggal 07/06/2025. Sumber: cnnindonesia.com

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia yang pada tanggal 07 Juni 2025 menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Halmahera yaitu pada empat perusahaan pertambangan PT. Gag Nikel, PT. Kawei Sejahtera Mining, PT. Anugrah Surya Pratama, dan PT. Mulya Raymond Perkasa.

Dengan demikian tercapailah tujuan utama *agenda setting* dalam isu ini yaitu penghentian aktivitas pertambangan di Kabupaten Raja Ampat walaupun masih bersifat suatu penghentian sementara.

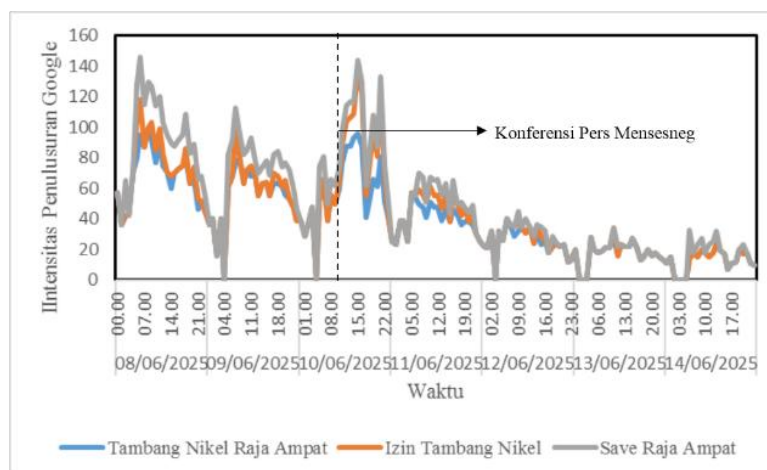
Pengambilan tindakan kebijakan oleh pemerintah ini menjelaskan mengenai turun drastisnya atensi publik sebagaimana yang kita ketahui dari gambar 1.3 yang

menunjukkan penurunan pencarian terhadap topik yang relevan dengan kata kunci “tambang nikel raja ampat” setelah tanggal 07 Juni 2025. Hal ini dapat diakibatkan oleh turunnya atensi dan tuntutan publik yang beranggapan bahwa tujuan agenda publik telah tercapai dengan diimplementasikannya kebijakan penghentian sementara aktivitas pertambangan di Kabupaten Raja Ampat.

Meskipun publik menunjukkan penurunan atensi terhadap isu aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, agenda kebijakan yang tengah berlangsung terus memberikan tekanan terhadap pemerintah untuk mengambil langkah permanen. Menjadikan pemberitaan penghentian sementara aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat tentu bukan langkah yang ideal, di mana masih terdapat kemungkinan naik kembalinya atensi publik apabila terdapat individu-individu berpengaruh yang mengkritisi kebijakan tersebut

sebagaimana yang terjadi pasca unggahan Susi Pudjiastuti yang dengan efektif mengembalikan atensi masyarakat dan mengeskalisasi isu tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 di mana pasca pengumuman penghentian sementara aktivitas pertambangan nikel oleh Bahlil Lahadalia pada tanggal 07/06/2025, masih terdapat fluktuasi atensi publik pada periode tanggal 07/06/2025 hingga 09/06/2025.

Pada tanggal 10/06/2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengumumkan pencabutan permanen Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan tambang di Kabupaten Raja Ampat. Hal ini menjadi kebijakan akhir pemerintah sebagai penutup agenda kebijakan yang menunjukkan bahwa fokus dari pemerintah adalah mendeskalisasi isu, atensi, dan ketidakpercayaan publik.



Gambar 7. Data intensitas pencarian google.co.id memperlihatkan aktivitas pencarian dengan kata kunci “Tambang Nikel Raja Ampat”, “Izin Tambang Nikel” dan “Save Raja Ampat” dalam kurun waktu satu minggu (08/06/2025-14/06/2025). Sumber: <https://trends.google.co.id> (data diambil pada tanggal 14/06/2026, Pukul 20.00 WIB).

Gambar 1.7 memperlihatkan bahwa setelah pengumuman pencabutan permanen IUP perusahaan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat terdapat penurunan aktivitas penelusuran yang signifikan dan konsisten dari tanggal 11/06/2025-14/06/2025. Hal ini berbeda apabila kita mengamati fluktuasi atensi publik pasca pengumuman penghentian sementara aktivitas pertambangan pada tanggal 07/06/2025 yang masih memperlihatkan fluktuasi atensi publik yang cukup signifikan hingga tanggal 09/06/2025 (lihat gambar 1.3). Dapat disimpulkan bahwa turunnya atensi publik pasca konferensi pers Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 10/06/2025 menunjukkan bahwa perkembangan dalam agenda kebijakan telah mencapai titik kepuasan yang diinginkan publik dan media. Media arus utama dan media sosial (publik) tidak lagi memiliki tendensi dan urgensi dalam meliput dan memberitakan secara eksekutif mengenai perkembangan lanjutan dalam rangka mempertahankan *status quo* baru pasca keputusan presiden dan tidak memberikan ruang lebih terhadap narasi-narasi yang bertentangan dengan agenda yang telah ditetapkan media dan didukung oleh publik tersebut.

KESIMPULAN

Analisis terhadap pemberitaan mengenai isu aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat ini membuktikan bahwa pengangkatan dan intensifikasi pemberitaan suatu isu oleh media massa merupakan suatu pendekatan yang efektif dalam mengkomunikasikan suatu krisis (*crisis communication*) dan melakukan aktivisme media (*media activism*). Media memiliki peranan yang krusial dalam membentuk persepsi dan tindakan publik

terhadap suatu isu. Pemberitaan yang intensif oleh media juga turut dalam mengkonstruksi *popular demand* yang ada di publik. Dapat dilihat bahwa eksistensi dari lahirnya desakan kepada pemerintah dalam bentuk *popular demand* tidak dapat dilepaskan dari partisipasi individu-individu berpengaruh dalam menyuarakan isu tersebut, sebagaimana dalam kasus ini direpresentasikan dengan partisipasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang menjadi intermediari antara isu media dengan publik, serta menjadi *key opinion leader* dan katalis peningkatan atensi publik terhadap isu tersebut.

Berdasarkan perspektif teori *agenda setting*, pemberitaan atas isu aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat ini menjadi suatu agenda dapat dikatakan relatif berhasil menimbang beberapa aspek seperti waktu yang relatif singkat untuk mentransformasikan agenda media hingga menjadi suatu agenda kebijakan (03/06/2025 hingga 10/06/2025) atau kurang lebih dalam kurun waktu seminggu. Faktor kedua adalah skala dari atensi dan partisipasi publik yang begitu masif yang mampu dihimpun dalam waktu yang relatif singkat. Analisis ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor dan aspek yang dapat membentuk dan mempengaruhi implementasi agenda yang dikonstruksi oleh media, di mana aspek tersebut adalah:

1. *Status Quo*: bagaimana media melihat *status quo* dan menilai apakah isu tersebut memerlukan atensi publik atau tidak serta apakah isu tersebut memiliki urgensi atau tidak turut mempengaruhi pengadopsian suatu isu menjadi agenda media.

2. Aktor: pihak-pihak maupun individu-individu yang berpartisipasi juga berperan penting untuk menjadi katalis dan mendistribusikan informasi mengenai isu tersebut kepada khalayak publik.
3. Persepsi Publik: bagaimana persepsi publik membentuk respon publik terhadap agenda media. Dalam hal ini persepsi publik yang sebelumnya berorientasi kepada keindahan dan konservasi alam di Kabupaten Raja Ampat dapat mempengaruhi reaksi publik terhadap pemberitaan mengenai aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat.
4. Urgensi Agenda: Agenda yang ditanamkan oleh media harus lah memiliki bobot urgensi yang mana dengan mengemasnya melalui pendekatan komunikasi krisis, media dapat menanamkan *sense of urgency* yang mendesak ke dalam persepsi publik.
5. Partisipasi Publik: Partisipasi publik dapat dijadikan sebagai indikator apakah publik telah mengadopsi agenda media menjadi agenda publik. Partisipasi publik dalam mengadopsi agenda media juga turut mengkonstruksi *popular demand* dan memberikan tekanan kepada *stakeholders*.
6. Tingkat Kepuasan (*degree of satisfaction*): Tingkat kepuasan media dan publik juga turut menentukan momentum eskalasi, deeskalasi, maupun eskalasi ulang suatu isu. Tingkat kepuasan publik dan agenda juga dapat dijadikan indikator apakah akan ada tindakan

atau eskalasi isu lanjutan pasca pengadopsian agenda menjadi agenda kebijakan.

Seluruh unsur tersebut dapat kita jumpai dalam proses pemberitaan isu aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat yang mana menunjukkan bahwa pemberitaan isu aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat merupakan suatu pendekatan *agenda setting* yang efektif dan efisien oleh media massa. Analisis ini juga menemukan bahwa aktivisme media yang dibalut dengan komunikasi krisis terbukti dengan efektif dapat mengumpulkan atensi publik dan membuat perubahan atau dampak yang nyata melalui pengadopsian agenda media tersebut menjadi agenda kebijakan dengan dicabutnya IUP keempat perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abisono, F. G. (2024). Di Bawah Bayang-Bayang Perubahan Iklim: Transformasi Negara Pembangunan dan Agenda Transisi Energi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 95–118. <https://doi.org/10.14710/politika.15.1.2024.95-118>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Astari, N. (2021). Sosial Media Sebagai Media Baru Pendukung Media Massa untuk Komunikasi Politik dalam Pengaplikasian Teori Agenda Setting: Tinjauan Ilmiah pada Lima Studi Kasus dari Berbagai Negara. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 131–142.

- <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.190>
- Azman. (2018). Penggunaan Media Massa dan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Komunikasi. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.22373/jp.v1i1.2759>
- Hadi S, I. B., Pratiwi Kurniawan, E., & Irwansyah, I. (2021). Agenda Setting Dalam Isu-Isu Kontemporer di Seluruh Dunia. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 105–119. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.188>
- Hady, O. (2018). Perlindungan Hutan Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sawai dari Kegiatan Usaha Pertambangan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 68–78. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2113>
- Harcup, T., & O'Neill, D. (2017). What is News?: News values revisited (again). *Journalism Studies*, 18(12), 1470–1488. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2016.1150193>
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, & Ria Rahmatul Istiqomah. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Hastanti, B. W., & Triantoro, R. G. N. (2012). Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi: Studi Kasus di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 1(2), 149–164. <https://doi.org/10.18330/jwallacea.2012.vol1iss2pp149-164>
- Hutagalung, Kezia Kurnia Karlos Domingo, & Geganesywara, M. A. (2025). Sengketa Perdagangan Dan Hukum Lingkungan: Dampak Kebijakan Energi Hijau Terhadap Negara Berkembang (Studi Kasus Gugatan UNI Eropa Di WTO Akibat Larangan Ekspor Biji Nikel Oleh Indonesia). *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3), 172–179. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012025>
- Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, B., Pitkänen, K., Leskinen, P., Kuikman, P., & Thomsen, M. (2016). Green economy and related concepts: An overview. *Journal of Cleaner Production*, 139, 361–371. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024>
- Masitah, A. D., & Dewi, D. S. K. (2022). Analisis Opini Publik Berdasarkan Teori Agenda Setting Pada Proses Perencanaan Pemindahan IKN. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISP)*, 6(3), 2598-9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3374>
- Muhid, M., Surya, B., & Yahya, I. (2024). Studi Implikasi Eksploitasi Sumber Daya Alam Pertambangan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar PT. IWIP Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah. *Journal of Urban Planning Studies*, 5(1), 78–83.
- Nitesh Tripathi. (2023). A Study on “Attention Harvesting” Strategies used by Mass Media and its Implications. *Journal of Communication and Management*, 2(02), 153–157. <https://doi.org/10.58966/JCM20232215>
- Raihan, A., Muhtasim, D. A., Pavel, M. I., Faruk, O., & Rahman, M. (2022). An econometric analysis of the potential emission reduction components in Indonesia. *Cleaner Production Letters*, 3, 100008.

- <https://doi.org/10.1016/j.clpl.2022.100008>
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 32–41. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1460>
- Rouse, W. B., & Rouse, S. H. (1984). Human information seeking and design of information systems. *Information Processing & Management*, 20(1–2), 129–138. [https://doi.org/10.1016/0306-4573\(84\)90044-X](https://doi.org/10.1016/0306-4573(84)90044-X)
- Syarifuddin, N. (2022). Pengaruh Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan Maritim di Kabupaten Morowali. *Jurnal Riset & Teknologi Terapan Kemaritiman*, 1(2), 19–23. <https://doi.org/10.25042/jrt2k.122022.03>
- Trigueros, J., & Lacasa-Mas, I. (2018). Colloquy with Maxwell McCombs at the University of Texas at Austin: Agenda setting, a limitless theory in a connected world. *Church, Communication and Culture*, 3(1), 53–74. <https://doi.org/10.1080/23753234.2018.1430513>
- Zola, G., Nugraheni, S. D., Rosiana, A. A., Pambudy, D. A., & Agustanta, N. (2023). Inovasi kendaraan listrik sebagai upaya meningkatkan kelestarian lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia, 11(3), 159–170.
- Zahariadis, N. (Ed.). (2016). *Handbook of Public Policy of Agenda Setting*. Edward Edgar Publishing.